



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAPORAN KINERJA
CLKD
TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja, LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (Tujuh) indikator kinerja utama, ke 7 (Tujuh) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Februari 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 7 (tujuh) dari target sasaran telah memenuhi target, namun terdapat target yang tidak terealisasi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	11
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	 12
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
2.1.1 Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	13
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	15
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	17
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.7 Rencana Anggaran Tahun 2017	20
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2017.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	44
Analisa Efisiensi.....	46
 BAB IV. PENUTUP.....	 48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	8
Tabel 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017.....	9
Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	10
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 ...	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017	18
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017	21
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2017	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017	24
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017.....	44
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
-----------	--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Grafik 1.2 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan.....	8
Grafik 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017	9
Grafik1.4 Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural	10
Grafik 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2017.....	53
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.	57
Lampiran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.....	62
Lampiran 4. Data Capaian Kinerja	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; **g. pemberdayaan masyarakat dan Desa**; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan dan Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas : a). Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanahkan pada Pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Pasal 5 Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

- (1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2017 adalah :

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan/kelurahan;
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai guna mendukung operasional perkantoran;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat desa/kelurahan;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.5.1. Organisasi

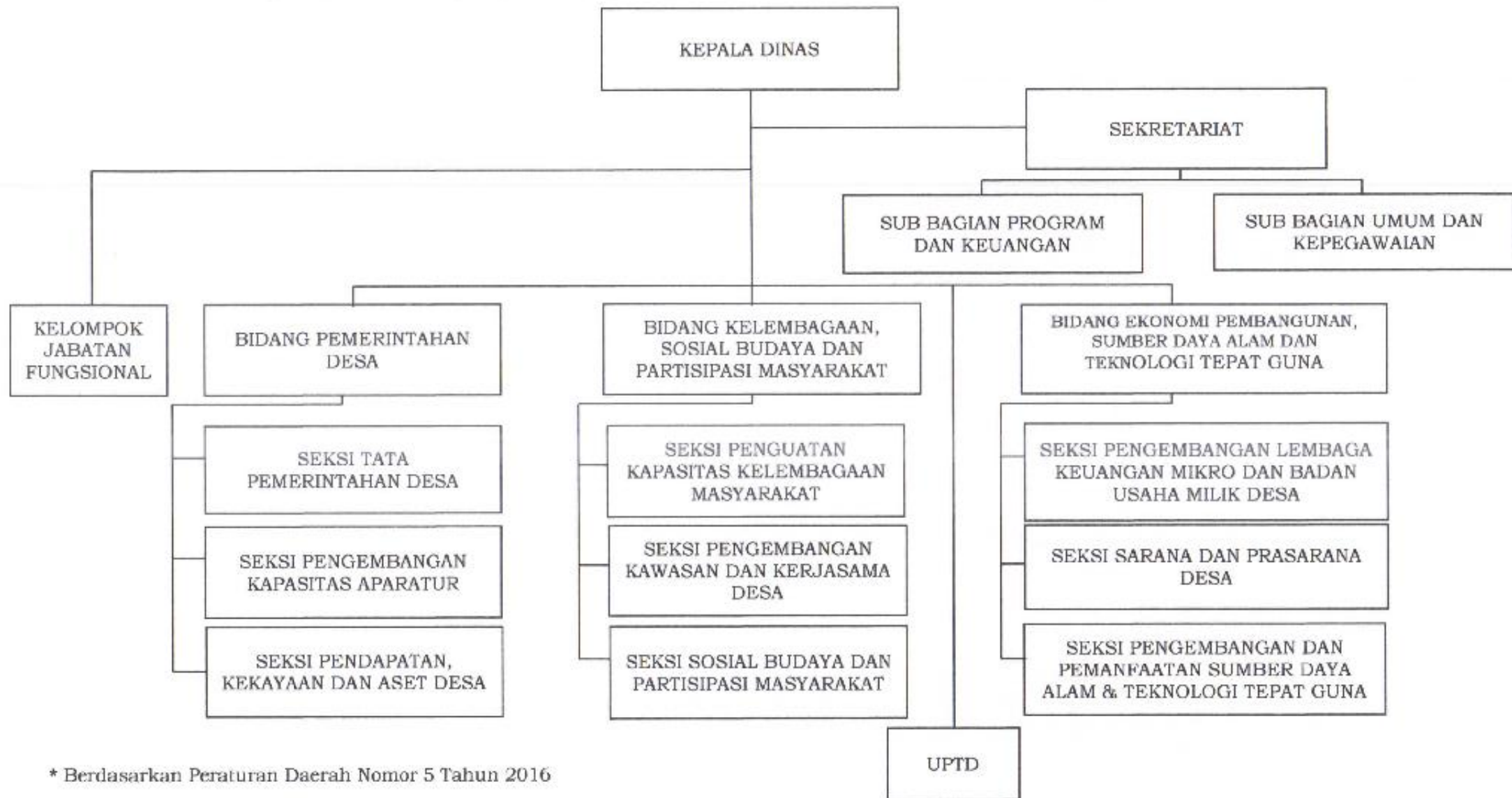
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.

- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 - Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa; dan
 - Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

1.6. Komposisi SDM Organisasi

Sumber daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2017 adalah 26 Orang.

1.6.1. Komposisi SDM berdasarkan Gender

Dari 26 jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 14 Orang Laki-laki dan 12 Orang Perempuan, berikut Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jumlah Pegawai	
1	Laki-Laki	14	Orang
2	Perempuan	12	Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2017

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih banyak Laki-Laki dibandingkan dengan Perempuan.



Grafik 1.1.

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

1.6.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam menjalankan roda organisasi

Tabel 1.2
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
1	SD	1	Orang
2	SLTP	-	Orang
3	SLTA	8	Orang
4	D3	1	Orang
5	S1	11	Orang
6	S2	5	Orang
JUMLAH		26	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2017

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai mayoritas pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 11 Orang dan selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 8 Orang.



Grafik 1.2.

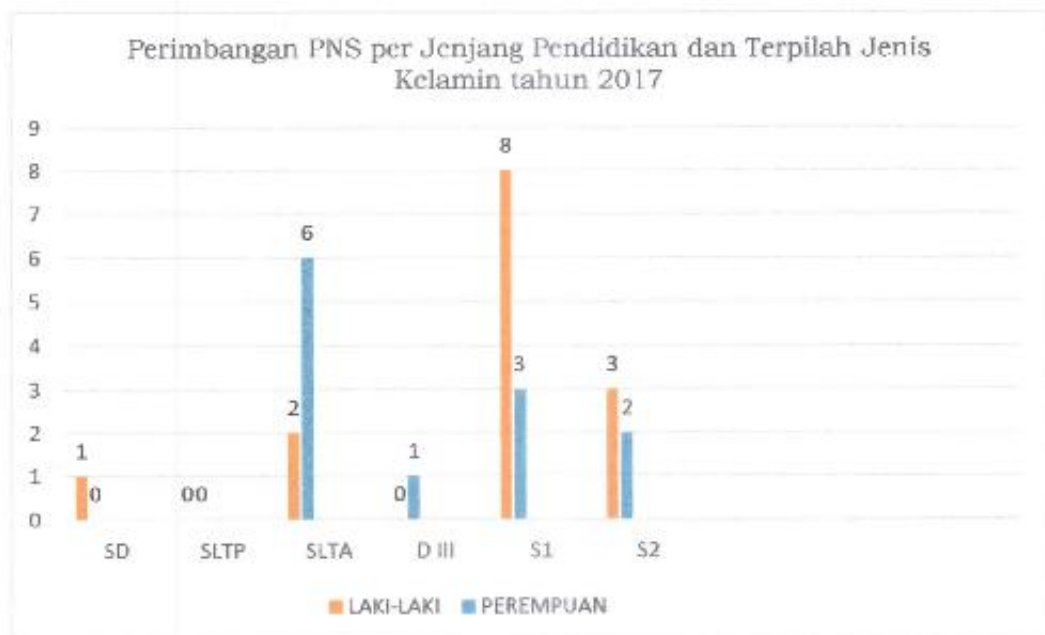
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3
Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017

Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah	%
SD	Laki-Laki	1	3,84
	Perempuan	-	-
SLTP	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTA	Laki-Laki	2	7,69
	Perempuan	6	23,07
D3	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	1	3,84
S1	Laki-Laki	8	30,76
	Perempuan	3	11,53
S2	Laki-Laki	3	11,53
	Perempuan	2	7,69
JUMLAH		26	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2017

Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa secara umum dari semua jenjang pendidikan jumlah PNS Laki-laki lebih dominan dibanding PNS perempuan, kecuali pada jenjang pendidikan SLTA lebih banyak PNS perempuan daripada Laki-laki.



Grafik 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017

1.6.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dari 26 Orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 7 Orang Perempuan yang menduduki jabatan baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV, berikut ini Gambar/Grafik Komposisi Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural.



Grafik 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural

1.6.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang memiliki usia yang cukup tua yang harus selalu terpelihara agar dapat mendukung operasional dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat. Nilai Aset yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2017 adalah Rp. 1.692.884.411,- terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp. 1.414.082.351,- dan asset lainnya Rp. 278.802.060,- berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Perlengkapan	Jumlah (Satuan)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	3 Unit	
2	Rumah Dinas	1 Unit	

3	Kendaraan roda empat	1 unit	Operasional Kepala Dinas
4	Kendaraan roda dua	14 Unit	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner (AC) dan lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja.

1.7. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

Visi :

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah

**"Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Desa
Berbasis Potensi Lokal"**

MISI :

Dalam memenuhi visi diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mencanangkan misi, yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.
2. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas.

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- ❖ *Misi 1 Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.*

Tujuan:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.

- ❖ *Misi 2 Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat*

Tujuan :

1. Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

- ❖ *Misi 3 Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.*

Tujuan :

1. mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.

- ❖ *Misi 4 Meningkatkan peran perempuan di pedesaan*

Tujuan :

1. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan

- ❖ *Misi 5 Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.*

Tujuan :

1. Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam.

- ❖ *Misi 6 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas.*

Tujuan :

1. Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.	Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	LPM	50	80
Tujuan 2. Mengkoordinir kegiatan usaha- usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa	Terbentuknya Badan Usaha Ekonomi Desa di masing-masing Desa	BUMDesa	36	67
	Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Secara berkesinambungan	Lembaga Keuangan Mikro	21	21
Tujuan 3. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat	Jumlah masyarakat yang melaksanakan gotong royong dan partisipasi dalam pembangunan	Desa/ Kelurahan	80	80
Tujuan 4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan	Jumlah Lembaga PKK Aktif	TP. PKK	90	90
Tujuan 5 : Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan hasil inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Kelompok	7	13
Tujuan 6 : Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan	Tata Kelola pemerintahan Desa yang baik	Desa	67	67

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

❖ Tujuan 1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat

Sasaran:

1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas

❖ Tujuan 2 Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

❖ Tujuan 3 Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan,

❖ Tujuan 4 Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan

Sasaran :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan

❖ Tujuan 5 Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam

Sasaran :

1. Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam

❖ Tujuan 6 Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Indikator 1 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM=50; Pokja Posyandu Desa =30	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa =80
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	LPM	50 LPM	80 LPM
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Indikator 1 : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	41	67
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	LKM	21	21
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Indikator 1 : Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	%	47	38
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Indikator 1 : Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program pokok PKK	%	100	100
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Indikator 1 : Jumlah alat inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Alat	9	14
Sasaran 6 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Indikator 1 : Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata provinsi	Desa	0	15

2.4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG
Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Program 1 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Program 2 : Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan Program 3 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Program 4 : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Indikator 1 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM=75; Pokja Posyandu Desa =75
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	LPM	75 LPM
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Indikator 1 : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	61 BUMDesa
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	LKM	21 LKM
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Indikator 1 : Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	%	23 %
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Indikator 1 : Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program pokok PKK	%	100%
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Indikator 1 : Jumlah alat inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Alat	2 Alat

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Sasaran 6 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Indikator 1 : Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	Desa	12 Desa

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5

IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	Unit	Jumlah PKK; LPM dan Pokja Posyandu Desa yang aktif	Data PKK, LPM dan Pokja Posyandu Aktif
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	Total Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	Keputusan Bupati Sinjai tentang Pengesahan penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Sinjai
Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	Total Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Hasil Perhitungan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	Jumlah Hasil Perhitungan Lembaga Keuangan Mikro yang aktif
Meningkatnya peran serta masyarakat	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi	%	Jumlah Masyarakat yang	Data Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	dalam pembangunan Desa		melakukan Gotong Royong dibagi Jumlah Penduduk x 100%	dalam pembangunan
Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	Jumlah Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dibagi Jumlah Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK x 100%	Data Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	Jumlah Alat Teknologi tepat guna yang dihasilkan berdasarkan potensi sumber daya alam	Data Jumlah Alat yang dihasilkan
Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	Desa	Laporan Hasil Perhitungan Tipologi Desa berdasarkan Profil Desa	Laporan Hasil Perhitungan Tipologi Desa Berdasarkan Profil Desa

2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.995.770.581,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.847.461.951,-	36,98
2	Belanja Langsung	3.148.308.630,-	63,02
Jumlah			100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	300.293.500,-	14,45
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif		
Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	156.160.000,-	7,51
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	32.077.000	1,54
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	28.505.000	1,37
Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	580.967.500	27,96

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	137.968.500,-	6,64
Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	841.448.200	40,50
TOTAL		2.077.419.700	100,00

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 2.077.419.700,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan besaran 40,50%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan yaitu sebesar 27,96%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan sebesar 1,37% dari total anggaran belanja langsung dan sisanya merupakan anggaran program rutin dan kesekretariatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 ≤ 90	Tinggi	T
3.	66 ≤ 75	Sedang	S
4.	51 ≤ 65	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

3.1. Capaian Indikator Kinerja 2017

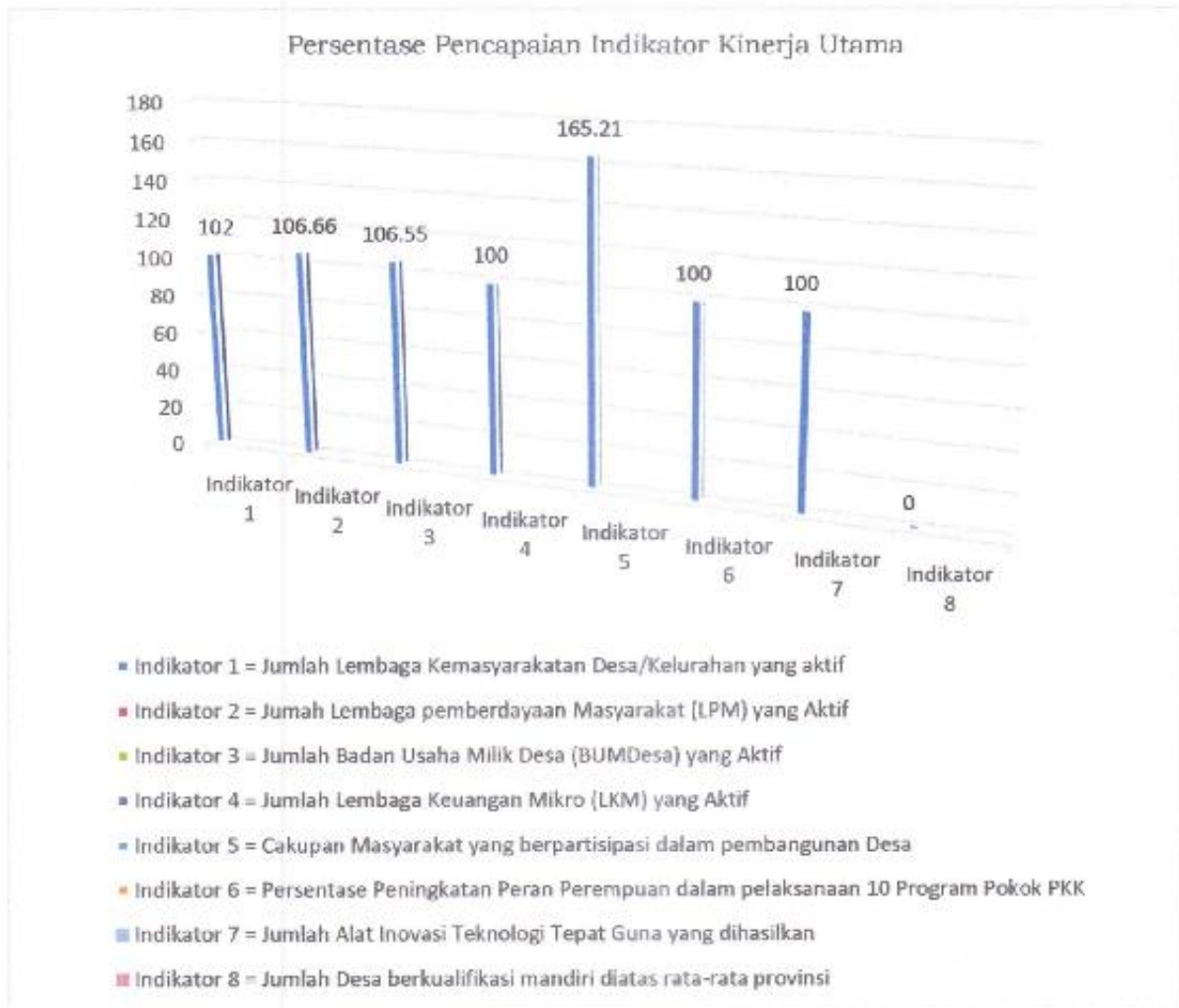
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM= 50; Pokja Posyandu Desa =30	PKK=80; LPM= 75; Pokja Posyandu Desa =75	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa =75	102	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa= 80	97,91
2	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	50 LPM	75 LPM	80	106,66	80 LPM	100
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	41 BUM-Desa	61 BUM-Desa	65	106,55	67	97,01
4	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21 LKM	21 LKM	21	100	21	100

5	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	47 %	23 %	38	165,21	23	165,21
6	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100 %	100 %	100	100	100	100
7	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	9 Alat	2	2	100	14	14,29
8	Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata provinsi	0 Desa	12	0	0	15	0
Rata-Rata Capaian					97,55		84,30

Dari 8 (*Delapan*) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017, 4 (*Empat*) indikator menunjukkan capaian 100% yaitu sasaran Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif, Sasaran Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa, sasaran Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK, Sasaran Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan dan 3 (*tiga*) indikator menunjukkan diatas 100% yaitu sasaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif, Sasaran Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif, sasaran Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif dan sasaran cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat 7 (*Tujuh*) atau keseluruhan indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, namun indikator Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata provinsi dengan capaian 0%. Berikut Grafik Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.



Grafik 3.1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017

3.1.1. Pengukuran Kinerja Misi 1

“Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia”

Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM= 75; Pokja Posyandu Desa = 75	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa = 75	102
2.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	75 LPM	80 LPM	106,66
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					104,33

Indikator kinerja Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni dengan target PKK = 80; LPM = 75; Pokja Posyandu Desa = 75 dengan realisasi PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 75 sehingga capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 102%.

Indikator kinerja Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni dengan target 75 LPM dengan realisasi 80 LPM sehingga capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 106,66%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
	2016	2017	2016	2017
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM=50; Pokja Posyandu Desa= 30	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa=75	100	102
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	50 LPM	80 LPM	100	106,66

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** mengalami peningkatan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2017	Capaian (%)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa = 75	97,91
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	80 LPM	80 LPM	100

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 97,91% dari target 100%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dengan baik;
2. Dengan adanya Dana Desa pembangunan semakin berkembang dan pengelolaan administrasi pemerintahan Desa semakin membaik dan menciptakan pembangunan yang terarah.
3. *Dalam pelaksanaan kegiatan PKK, telah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai maupun pemerintah Desa yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan PKK dapat berjalan dengan baik.*
4. Meningkatnya kesadaran para pengurus PKK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus PKK
5. Adanya regulasi mengenai PKK mulai dari tingkat Pusat sampai kabupaten.
6. Adanya kesadaran pemerintah Desa/Kelurahan bahwa peran posyandu dalam sistem pelayanan kesehatan dasar sangat penting terutama kegiatan imunisasi, gizi dan upaya kesehatan ibu dan anak.
7. Dengan adanya Dana Desa Pembangunan dan pemberdayaan posyandu sudah menjadi perhatian bagi pemerintah desa.
8. Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Lintas Sektor semakin terarah.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum sepenuhnya bekerja maksimal.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harusnya bersifat independen, mandiri dan kreatif.
3. Pemerintah Desa tidak memberikan kewenangan penuh dalam kegiatan pembangunan sebagaimana tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Sumber daya manusia aparat Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan pembinaan pokja posyandu masih kurang.
5. Perlunya perhatian pemerintah secara berkelanjutan terhadap keberadaan lembaga terkait pelayanan dasar posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.
6. Perlu peningkatan sumber daya manusia para pengurus Pokja Posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Melakukan Pembinaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
2. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM;
3. Melakukan penguatan LPM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

4. Telah dilakukan pembinaan bagi kader-kader PKK berupa bimbingan teknis, Pelatihan, penyuluhan, pelatihan keterampilan, rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan
5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi ditingkat kabupaten terkait pembinaan pokjanal posyandu.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah sebesar Rp. 300.293.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 298.599.500,- atau 99,43% dengan rata-rata capaian kinerja 104,33%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,57%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pendukung sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah Program Peningkatan keberdayaan masyarakat di pedesaan.

Kegiatan pendukung sasaran antara lain :

1. Pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten;
3. Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

3.1.2. Pengukuran Kinerja Misi 2

“Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat”

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	61	65	106,55
2.	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	21	21	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					103,27

Dari 3 (Tiga) Indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat**, masing-masing terealisasi Indikator Kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif pada capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni 106,55%.

Indikator kinerja Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni 100% yang jumlahnya konstan 21 LKM tetap terbina setiap tahun sebanyak 21 unit LKM.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
	2016	2017	2016	2017
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	41	65	113,88	106,55
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21	21	100	100

Dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat** mengalami peningkatan capaian.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2017	Capaian (%)
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	67	65	97,01
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	21	21	100

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 97,01% dari target 100%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang

terdapat dalam Renstra, maka capaian kinerja telah mencapai 100% walaupun jumlah LKM adalah Konstan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh :

1. Tingginya kepedulian instansi terkait dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya simpan pinjam khusus perempuan (SPP);
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dasar pengelola LKM melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten;
3. Selain itu sosialisasi dan informasi yang lengkap mengenai BUMDesa dan memiliki Payung Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Disosialisasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa di 8 (Delapan) Kecamatan, yang memungkinkan BUMDesa dibentuk dan dikembangkan.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi yang dapat membangkitkan Perekonomian Masyarakat terdapat masalah-masalah yang dihadapi yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan aktif melaksanakan aktivitas perekonomian, akan tetapi unit usaha yang dibentuk belum berdasarkan potensi unggulan Desa dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Masih banyak usaha BUMDesa yang bergerak dibidang simpan pinjam
3. Pemahaman pengurus Lembaga Keuangan Mikro yang baru belum memadai
4. Ada beberapa kelompok SPP yang tunggaknya bermasalah

Solusi :

Dari permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. BUMDesa yang terbentuk diarahkan untuk membentuk unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi lokal wilayah dan Pengurus BUMDesa ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan dan bimbingan.
2. Penguatan kapasitas Pengurus UPK yang baru melalui Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi perkembangannya yang melibatkan stakeholder terkait.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat** adalah sebesar Rp. 188.237.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 161.704.000,- atau 85,90%

dengan rata-rata capaian kinerja 103,27%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,1%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pendukung sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan.

Kegiatan pendukung sasaran antara lain :

1. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Pelatihan Pengelola BUMDesa;
3. Identifikasi BUMDesa berprestasi.

3.1.3. Pengukuran Kinerja Misi 3

“Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat”

Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	%	23	38	165,21

Indikator kinerja cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa pada sasaran **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan** capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni 38 % sehingga capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 165,21%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2016	2017	2016	2017
Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa		47	38	204,34	165,21

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program pembangunan di Pedesaan, pada tahun 2016 capaiannya melampaui target dengan capaian sebesar 204,34% sedangkan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 165,21%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2017	Capaian (%)
Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	%	23	42,5	184,78

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah melampaui target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Tingkat kesadaran masyarakat mulai membaik dalam hal melakukan gotong royong;
2. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD teknis semakin terarah;
3. Administrasi pemerintahan desa semakin baik sehingga mampu menghitung partisipasi masyarakat.

Permasalahan :

Dalam mencapai sasaran Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti :

1. Sumberdaya Manusia aparatur Desa dalam hal kompetensi masih rendah;
2. Masih rendahnya pendekatan persuasif kepada masyarakat oleh

- Pembina Desa dan tokoh masyarakat;
3. Masih perlu peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, dapat terpecahkan dengan berbagai solusi yang dilakukan, seperti :

1. Perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi aparatur Desa dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat;
2. Pembinaan berkelanjutan oleh OPD terkait terutama Dinas PMD;
3. Perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi masyarakat dan aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa adalah sebesar Rp. 28.505.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 28.292.000,- atau 99,25% dengan capaian kinerja 165,21%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,75%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pendukung sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan di Pedesaan adalah Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

3.1.4. Pengukuran Kinerja Misi 4

“Meningkatkan peran perempuan di pedesaan”

Sasaran 1 : Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	100	100	100

indikator kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK pada sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
	2016	2017	2016	2017
Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100	100	100	100

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** mencapai target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2017	Capaian (%)
Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	100	100	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 100% dari target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh motivasi dan semangat kerja yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dan stakeholder lainnya serta dukungan dana yang ada.

Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu mendorong dan memotivasi Kader-kader PKK untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan workshop secara berkesinambungan. Melakukan pembinaan secara rutin setiap tahun, baik pembinaan administrasi maupun pembinaan keterampilan.

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** ditemui berbagai permasalahan-permasalahan, seperti :

1. Sebagian pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kader PKK mempunyai tugas pokok masing-masing sehingga sulit diharapkan partisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan Kegiatan PKK.
2. Anggota Dasa Wisma masih ada yang belum aktif di setiap kelompok Dasa Wisma karena kesibukan mengurus rumah tangga dan aktifitas masing-masing.
3. Pelaporan hasil kegiatan Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan, kecamatan belum tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** ditempuh solusi, sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan pemahaman kepada Pengurus PKK Kabupaten dan Kader PKK bahwa pentingnya mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tugas pokok dan tambahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
 2. Telah dilakukan pemantauan dan pembinaan di setiap Kecamatan agar anggota Dasa Wisma dapat aktif, terutama dalam melaksanakan Pendataan Dasa Wisma di setiap wilayah tempat tinggal masing-masing.
 3. Setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah diberikan surat tentang jadwal pelaporan agar tepat waktu
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** adalah sebesar Rp. 580.967.600,- dari anggaran yang dialokasikan tersebut terealisasi sebesar Rp. 575.542.600,- atau 99,06% dengan rata-rata capaian sebesar 100%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,94%.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pendukung terhadap pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** adalah Program Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan.

Kegiatan pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK;
- b. Pembinaan Kelompok Dasa Wisma;
- c. Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan POSYANDU;
- d. Pembinaan dan Pengembangan UP2K;
- e. Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK;
- f. Penyuluhan PHBS;
- g. Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga;
- h. Lomba Kelompok Kadarkum;
- i. Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu;
- j. Workshop Tata Cara Berbusana yang baik;
- k. Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- l. Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

3.1.5. Pengukuran Kinerja Misi 5

“Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna”

Sasaran 1 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	2	2	100

Indikator kinerja jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan pada sasaran **Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
	2016	2017	2016	2017
Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	10	2	100	100

Dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** mengalami peningkatan

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2017	Capaian (%)
Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	14	12	85,71

Perbandingan antara realisasi indikator **jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan** terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaian nnya telah mencapai 85,71% dari target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan Indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan sebanyak 2 alat tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh :

- Peningkatan kemampuan pendidikan, keterampilan, inovasi serta aplikasi Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat
- Adanya Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk merumuskan strategi yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam.

Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu alat inovasi

yang akan dihasilkan oleh masyarakat seyogyanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam dokumen pemetaan teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya alam; Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung teknologi lebih ditingkatkan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Minat masyarakat terhadap Inovasi Teknologi Tepat Guna masih rendah
2. Masyarakat belum mengetahui alat TTG yang ramah lingkungan, murah dan berdasarkan kearifan local setempat serta mempunyai nilai ekonomis untuk pendapatan keluarga yang bernilai jual.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ditempuh solusi-solusi yang dilakukan untuk mencapai target sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna, sebagai berikut :

1. Menggiatkan gerakan inovasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada berdasarkan kebutuhan masyarakat.
2. Dokumen Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) disosialisasikan dan diketahui masing-masing wilayah sebagai acuan untuk inovasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masing-masing wilayahnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran **meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** adalah sebesar Rp.137.968.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 137.968.500,- atau 100%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung terhadap pencapaian sasaran didukung oleh Program Pengembangan dan pengembangan Sumber Daya Alam dan TTG, Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Sumber Daya Alam Terbarukan, melalui kegiatan ini diharapkan potensi sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Kegiatan Pembentukan dan pembinaan posyantek sebagai wadah teknologi tepat guna di kecamatan dan Desa/kelurahan pada tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 9 (Sembilan) Posyantek yang berkedudukan di kecamatan dan 56 Wartek yang berkedudukan di Desa/Kelurahan; kegiatan ini dimaksudkan untuk pembentukan dan pembinaan Posyantek dan Wartek sebagai pusat bimbingan bagi pemanfaat/pengguna TTG dan sebagai pusat pelayanan informasi TTG

serta membuka peluang usaha.

Kegiatan dilaksanakan dengan rapat pembinaan pada Kecamatan, pembentukan Posyantek/Wartek.

3. kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional dalam upaya mempublikasikan dan mempromosikan alat hasil inovasi masyarakat.

3.1.6. Pengukuran Kinerja Misi 6

“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas”

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa berkualitas mandiri di atas rata-rata Provinsi	Desa	12	0	0

Indikator Kinerja Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata Provinsi pada sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri** capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
	2016	2017	2016	2017
Jumlah Desa berkualitas mandiri di atas rata-rata Provinsi	0	0	0	0

Indikator kinerja Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata Provinsi pada sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional,** tidak terealisasi.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2017	Capaian (%)
Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	Desa	15	0	0

Dari target yang telah ditetapkan dalam renstra indikator kinerja Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya desa yang memenuhi syarat Desa Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan menetapkan Desa Persiapan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 530 Tahun 2017 tentang Pencanangan Desa Persiapan Mandiri Kabupaten Sinjai.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tidak tercapainya/terrealisasinya target adalah sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi adalah :

1. Pengelolaan Data Kualifikasi Desa dan penetapan status Desa merupakan kewenangan pemerintah Pusat berdasarkan Instrument yang ada pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
2. Sumberdaya dan kompetensi aparatur Desa relatif masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penentuan klasifikasi Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia Aparatur masih rendah
2. Pemeliharaan hasil pembangunan secara swadaya masih perlu ditingkatkan
3. Terdapat 2 (dua) versi regulasi yang mengatur klasifikasi desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Solusi-solusi yang dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan langsung pada Desa.
2. Pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh Desa agar instrumen desa mandiri bisa tercapai.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2017 untuk pencapaian sasaran sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri** dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi adalah sebesar Rp. 841.448.200,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 835.956.684,- atau 99,34%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung terhadap pencapaian sasaran ini adalah :

1. Program peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa.
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Bimbingan teknis aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Program Pengembangan Data Dan Informasi Pedesaan.
Dengan kegiatan yang menunjang sebagai berikut :
Kegiatan Rakernis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
3. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa
Dengan kegiatan yang menunjang sebagai berikut :
 - a. Kegiatan evaluasi dan pelaporan administrasi asset Desa;
 - b. Kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - c. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - d. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa.
4. Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa;
 - b. Kegiatan monitoring dan evaluasi rancangan peraturan Desa;
 - c. Kegiatan Penyusunan Regulasi Asset Desa;
 - d. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - e. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Aset Desa (In House Training Aset Desa).

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 92,48% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam (100%). Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat (85,90%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM= 75; Pokja Posyandu Desa=75	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa=75	102	300.293.500	298.599.500	99,43
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	75 LPM	80 LPM	106,66			

2	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	61 BUM-Desa 21 LKM	65 21	106,55 100	188.237.000 	161.704.000 	85,90
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	23 %	38	165,21	28.505.000	28.292.000	99,25
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100 %	100	100	580.967.500	575.542.600	99,06
5	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	2	2	100	137.968.500	137.968.500	100
6	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualitas mandiri di atas rata-rata Provinsi	12	0	0	841.448.200	835.956.684	99,34

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 8 (Delapan) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 6 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	102	99,43	0,57
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	106,66		
2	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	106,55	85,90	20,65
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	100		
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	165,21	99,25	194,75
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100	99,06	0,94

5	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	100	100	0
6	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	0	99,34	24,34

Sebagai contoh, untuk sasaran Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas, telah mencapai kinerja sebanyak 100% bahkan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,43% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 165,21%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,25%.

Capaian sasaran Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,06%,

Sasaran Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 100%.

Namun sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator kinerja jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata provinsi tidak terealisasi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena terdapat 8 (Delapan) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2017

I. PENGHARGAAN DARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

- Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong sebagai duta Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Perlombaan *Desa Tingkat Nasional sebagai Juara I Lomba Desa Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) Tingkat Nasional* oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri .
- Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Bupati Sinjai atas Prestasi dalam Melakukan Pembinaan kepada Desa Juara Tingkat Regional Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

II. PENGHARGAAN DARI TINGKAT PROVINSI/KAB. TAHUN 2017

- Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa, dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan memperoleh Penghargaan pada Perlombaan *Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan* dari Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong sebagai Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.



**Piala
Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional Regional III**



**Piala
Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan**



**Sertifikat
Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Kepada BUPATI SINJAI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP**

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SABIRIN YAHYA, S.Sos**

Jabatan : Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 24 Februari 2017



Pihak Kedua,

H. SABIRIN YAHYA, S.Sos



Pihak Pertama,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Program Kesekretariatan dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kebutuhan operasional dan pelayanan administrasi Perkantoran yang disediakan	100 %
2.	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
3.	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Aparatur	Presentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	100 %
4.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Presentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100 %
5.	Meningkatnya Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
6.	Terwujudnya Keberdayaan dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	PKK = 80
			LPM = 75 LPM
			Pokja Posyandu Desa = 75 Pokja
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM = 75 LPM

7.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berbagai aspek yang Dapat Menunjang Kelangsungan Pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	100%
8.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di pedesaan	Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	23 %
9.	Meningkatnya inovasi Teknologi Tepat Guna Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 Alat
10.	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	12 Desa

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 412.379.630,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 489.654.000,00	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 58.900.000,00	APBD
4.	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 58.344.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 239.194.500,00	APBD
6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 188.237.000,00	APBD
7.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Rp 28.505.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 25.764.000,00	APBD
9.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp 580.967.500,00	APBD
10.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Rp 37.968.500,00	APBD

- | | | | |
|-----|--|-------------------|------|
| 11. | Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan | Rp 22.082.000,00 | APBD |
| 12. | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa | Rp 286.320.500,00 | APBD |
| 13. | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp 374.992.000,00 | APBD |



Pihak Kedua,

H. SABIRIN YAHYA, S.Sos



Sinjai, 24 Februari 2017

Pihak Pertama,

A. ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jln. Mading No. 5 Sinjai ☎ (0482) 21086 e-mail : dpmd.kabsinjai@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
28. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 75);
29. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan dan arahan terhadap proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi atau perangkat daerah terkait dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 - c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada pimpinan instansinya.

4

- KETIGA** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf sekretariat.
- KEEMPAT** : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan upah kerja 1 (satu) kali kegiatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 1.02.12.1.02.12.01.06.01
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : Januari 2018



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. SINJAI,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198403 1 001

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Sinjai;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sinjai;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SINJAI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besaran Upah Kerja (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Ketua	—	—
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Wakil Ketua	—	—
3.	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris	—	—
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota	—	—
5.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	—	—
6.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Anggota	—	—
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	—	—
8.	Syarif Hamra, SE., MM	Anggota	—	—
9.	A. Ida Royani	Anggota	—	—
10.	Hasniah, A. Md	Anggota	—	—
11.	Andi Miliyati	Anggota	—	—
12.	Andi Irwilda	Anggota	—	—
13.	Murnawati, S.IP	Sekretariat	200.000,-	1 kali keg.
14.	Niah	Sekretariat	200.000,-	1 kali keg.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 6 Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. SINJAI,

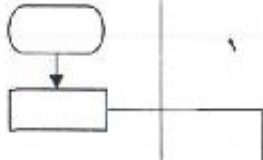
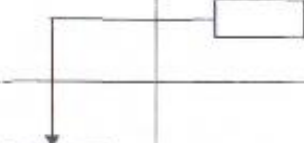
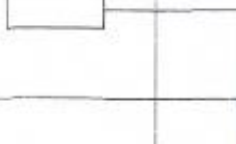
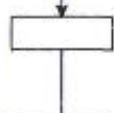
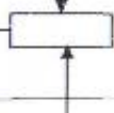


WA. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

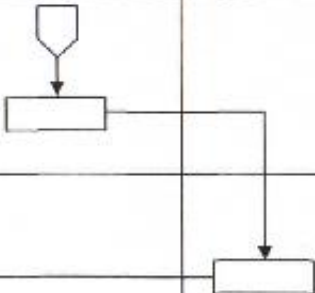
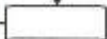
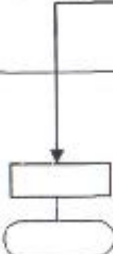


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	1.22.02.01.02.07
Tgl Pembuatan	14 Maret 2016
Tgl Revisi	28 April 2016
Tgl Efektif	11 Juli 2016
Disahkan oleh	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI  Drs. H. ABDUL TALHA, M.Si NIP. 19580311 198501 1 002
Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23)	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Laporan Kinerja SKPD2. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Keluar2. SOP Pembuatan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan	Peralatan Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Kertas Kop3. Printer4. Kertas
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	Pencatatan dan Pendataan

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Program	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat SK Tim Penyusun					1. Draf SK Tim Penyusun 2. Hasil Asistensi/ Harmonisasi dari Bagian Hukum Setdakab	5 x 3 Jam	SK Tim Penyusun	
2.	Membagi Tugas Tim Penyusun					SK Tim Penyusun	4 Jam	Pelaksanaan Tugas Tim Penyusun	
3.	Mengirim Surat Permintaan Data Laporan Kinerja ke Bidang Penanggungjawab Kinerja					Surat Permintaan Data Laporan Kinerja	7 Jam	Data Laporan Kinerja	
4.	Melakukan Verifikasi Data					1. Data Laporan Kinerja 2. Cek List data dari Bidang Penanggung jawab	14 x 6 Jam	Hasil Verifikasi Data	
5.	Menyusun draf Laporan Kinerja					1. Data Hasil verifikasi 2. Sistematika Laporan 3. Draf Bab I s/d Bab IV	7 x 6 Jam	Draf Laporan Kinerja	
6.	Melakukan Koreksi terhadap draf					Draft Laporan Kinerja	3 Jam	Hasil Koreksi Laporan Kinerja	

7.	Mengirim Laporan ke Inspektorat untuk Review				1. Laporan Kinerja 2. Surat Pengantar	2 Jam	Hasil Koreksi Laporan Kinerja	Review Inspektorat 5 Hari
8.	Finalisasi Laporan (Perbaikan Semua Hasil Review)				1. Review Laporan Kinerja 2. Laporan Hasil Review dari Inspektorat	5 x 3 Jam	Hasil Review Laporan Kinerja	
9.	Menyampaikan Laporan kepada Kepala Badan untuk Penandatanganan				Hasil Review Laporan Kinerja	4 Jam	Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat	

PKK AKTIF TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		NAMA PKK	KEAKTIFAN		KETERANGAN
					AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3		4	5	6	7
1	SINJAI BARAT	1	KEL. TASSILILU	PKK KEL. TASSILILU	√		
		2	KEL. BALAKIA	PKK KEL. BALAKIA	√		
		3	DESA GUNUNG PERAK	PKK DESA GUNUNG PERAK	√		
		4	DESA ARABIKA	PKK DESA ARABIKA	√		
		5	DESA BONTO SALAMA	PKK DESA BONTO SALAMA	√		
		6	DESA TURUNGAN BAJI	PKK DESA TURUNGAN BAJI	√		
		7	DESA BARANIA	PKK DESA BARANIA	√		
		8	DESA BONTO LEMPANGAN	PKK DESA BONTO LEMPANGAN	√		
		9	DESA TERASA	PKK DESA TERASA	√		
2	SINJAI TENGAH	10	KEL. SAMAENRE	PKK KEL. SAMAENRE	√		
		11	DESA KOMPANG	PKK DESA KOMPANG	√		
		12	DESA BARU	PKK DESA BARU	√		
		13	DESA PATTONGKO	PKK DESA PATTONGKO	√		
		14	DESA SAOTENGNGA	PKK DESA SAOTENGNGA	√		
		15	DESA SAOHIRING	PKK DESA SAOHIRING	√		
		16	DESA KANRUNG	PKK DESA KANRUNG	√		
		17	DESA SAOTANRE	PKK DESA SAOTANRE	√		
		18	DESA BONTO	PKK DESA BONTO	√		
		19	DESA MATTUNRENG TELLUE	PKK DESA MATTUNRENG TELLUE	√		
		20	DESA GANTARANG	PKK DESA GANTARANG	√		
3	SINJAI SELATAN	21	KEL. SANGIASERI	PKK KEL. SANGIASERI	√		
		22	DESA PUNCAK	PKK DESA PUNCAK	√		
		23	DESA SONGING	PKK DESA SONGING	√		
		24	DESA ASKA	PKK DESA ASKA	√		
		25	DESA TALLE	PKK DESA TALLE	√		

		26	DESA PALAE	PKK DESA PALAE	√		
		27	DESA BULUKAMASE	PKK DESA BULUKAMASE	√		
		28	DESA PALANGKA	PKK DESA PALANGKA	√		
		29	DESA POLEWALI	PKK DESA POLEWALI	√		
		30	DESA GARECCING	PKK DESA GARECCING	√		
		31	DESA ALENANGKA	PKK DESA ALENANGKA	√		
4	SINJAI BORONG	32	KEL. PASIR PUTIH	PKK KEL. PASIR PUTIH	√		
		33	DESA BATU BELERANG	PKK DESA BATU BELERANG	√		
		34	DESA BIJI NANGKA	PKK DESA BIJI NANGKA	√		
		35	DESA BARAMBANG	PKK DESA BARAMBANG	√		
		36	DESA BONTO SINALA	PKK DESA BONTO SINALA	√		
		37	DESA KASSI BULENG	PKK DESA KASSI BULENG	√		
		38	DESA BONTO KATUTE	PKK DESA BONTO KATUTE	√		
		39	DESA BONTO TENGNGA	PKK DESA BONTO TENGNGA	√		
5	TELLULIMPOE	40	KEL. MANNANTI	PKK KEL. MANNANTI	√		
		41	DESA SAOTENGAH	PKK DESA SAOTENGAH	√		
		42	DESA KALOBBA	PKK DESA KALOBBA	√		
		43	DESA TELLULIMPOE	PKK DESA TELLULIMPOE	√		
		44	DESA MASSAILE	PKK DESA MASSAILE	√		
		45	DESA LEMBANG LOHE	PKK DESA LEMBANG LOHE	√		
		46	DESA PATTONGKO	PKK DESA PATTONGKO	√		
		47	DESA BUA	PKK DESA BUA	√		
		48	DESA SUKAMAJU	PKK DESA SUKAMAJU	√		
		49	DESA ERA BARU	PKK DESA ERA BARU	√		
		50	DESA SAMATURUE	PKK DESA SAMATURUE	√		
6	SINJAI TIMUR	51	KEL. SAMATARING	PKK KEL. SAMATARING	√		
		52	DESA SANJAI	PKK DESA SANJAI	√		
		53	DESA PATTALASSANG	PKK DESA PATTALASSANG	√		
		54	DESA PANAIKANG	PKK DESA PANAIKANG	√		
		55	DESA SAUKANG	PKK DESA SAUKANG	√		
		56	DESA KAMPALA	PKK DESA KAMPALA	√		
		57	DESA LASIAI	PKK DESA LASIAI	√		

		58	DESA BIRORO	PKK DESA BIRORO	√		
		59	DESA KALOLING	PKK DESA KALOLING	√		
		60	DESA PASIMARANNU	PKK DESA PASIMARANNU	√		
		61	DESA TONGKE-TONGKE	PKK DESA TONGKE-TONGKE	√		
		62	DESA SALOHE	PKK DESA SALOHE	√		
		63	DESA BONGKI LENGKESE	PKK DESA BONGKI LENGKESE	√		
7	BULUPODDO	64	DESA LAMATTI RIATTANG	PKK DESA LAMATTI RIATTANG	√		
		65	DESA LAMATTI RIAJA	PKK DESA LAMATTI RIAJA	√		
		66	DESA BULUTELLUE	PKK DESA BULUTELLUE	√		
		67	DESA DUAMPANUAE	PKK DESA DUAMPANUAE	√		
		68	DESA TOMPOBULU	PKK DESA TOMPOBULU	√		
		69	DESA LAMATTI RIAWANG	PKK DESA LAMATTI RIAWANG	√		
		70	DESA LAPPACINRANA	PKK DESA LAPPACINRANA	√		
8	PULAU SEMBILAN	71	DESA PULAU HARAPAN	PKK DESA PULAU HARAPAN	√		
		72	DESA PULAU BUHUNG PITUE	PKK DESA PULAU BUHUNG PITUE	√		
		73	DESA PULAU PADAELO	PKK DESA PULAU PADAELO	√		
		74	DESA PULAU PERSATUAN	PKK DESA PULAU PERSATUAN	√		
9	SINJAI UTARA	75	KEL. BALANGNIPA	PKK KEL. BALANGNIPA	√		
		76	KEL. BIRINGERE	PKK KEL. BIRINGERE	√		
		77	KEL. LAPP	PKK KEL. LAPP	√		
		78	KEL. LAMATTI RILAU	PKK KEL. LAMATTI RILAU	√		
		79	KEL. BONGKI	PKK KEL. BONGKI	√		
		80	KEL. ALEHANUAE	PKK KEL. ALEHANUAE	√		
JUMLAH					80 Desa / Kel.		

SINJAI, 28 Desember 2017

KEPALA DINAS,



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

NIP. 19611103 198408 1 001

**JUMLAH LPM AKTIF SE-KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	AKTIF / TIDAK AKTIF
1	SINJAI UTARA	1 KEL. BALANGNIPA	AKTIF
		2 KEL. BIRINGERE	AKTIF
		3 KEL. LAPPA	AKTIF
		4 KEL. LAMATTI RILAU	AKTIF
		5 KEL. BONGKI	AKTIF
		6 KEL. ALEHANUAE	AKTIF
2	SINJAI BARAT	7 KEL. TASSILILU	AKTIF
		8 KEL. BALAKIA	AKTIF
		9 GUNUNG PERAK	AKTIF
		10 ARABIKA	AKTIF
		11 BONTO SALAMA	AKTIF
		12 TURUNGAN BAJI	AKTIF
		13 BARANIA	AKTIF
		14 BONTO LEMPANGAN	AKTIF
		15 TERASA	AKTIF
3	SINJAI SELATAN	16 KEL. SANGIASERI	AKTIF
		17 PUNCAK	AKTIF
		18 SONGING	AKTIF
		19 ASKA	AKTIF
		20 TALLE	AKTIF
		21 PALAE	AKTIF
		22 BULUKAMASE	AKTIF
		23 PALANGKA	AKTIF
		24 POLEWALI	AKTIF
		25 GARECCING	AKTIF
		26 ALENANGKA	AKTIF
4	SINJAI TIMUR	27 KEL. SAMATARING	AKTIF
		28 SANJAI	AKTIF
		29 PATTALASSANG	AKTIF
		30 PANAİKANG	AKTIF
		31 SAUKANG	AKTIF
		32 KAMPALA	AKTIF
		33 LASIAI	AKTIF
		34 BIRORO	AKTIF
		35 KALOLING	AKTIF
		36 PASIMARANNU	AKTIF
		37 TONGKE-TONGKE	AKTIF
		38 SALOHE	AKTIF
		39 BONGKI LENGKESE	AKTIF
5	SINJAI TENGAH	40 KEL. SAMAENRE	AKTIF
		41 KOMPANG	AKTIF
		42 BARU	AKTIF
		43 PATTONGKO	AKTIF
		44 SAOTENGNGA	AKTIF
		45 SAOHIRING	AKTIF
		46 KANRUNG	AKTIF
		47 SAOTANRE	AKTIF
		48 BONTO	AKTIF
		49 MATTUNRENG TELLUE	AKTIF
		50 GANTARANG	AKTIF

6	BULUPODDO	51	LAMATTI RIATTANG	AKTIF
		52	LAMATTI RIAJA	AKTIF
		53	BULUTELLUE	AKTIF
		54	DUAMPANUAE	AKTIF
		55	TOMPOBULU	AKTIF
		56	LAMATTI RIAWANG	AKTIF
		57	LAPPACINRANA	AKTIF
7	SINJAI BORONG	58	KEL. PASIR PUTIH	AKTIF
		59	BATU BELERANG	AKTIF
		60	BIJI NANGKA	AKTIF
		61	BARAMBANG	AKTIF
		62	BONTO SINALA	AKTIF
		63	KASSI BULENG	AKTIF
		64	BONTO KATUTE	AKTIF
		65	BONTO TENGGA	AKTIF
8	TELLULIMPOE	66	KEL. MANNANTI	AKTIF
		67	SAOTENGAH	AKTIF
		68	KALOBBA	AKTIF
		69	TELLULIMPOE	AKTIF
		70	MASSAILE	AKTIF
		71	LEMBANG LOHE	AKTIF
		72	PATTONGKO	AKTIF
		73	BUA	AKTIF
		74	SUKAMAJU	AKTIF
		75	ERA BARU	AKTIF
		76	SAMATURUE	AKTIF
9	PULAU SEMBILAN	77	PULAU HARAPAN	AKTIF
		78	PULAU BUHUNG PITUE	AKTIF
		79	PULAU PADAELO	AKTIF
		80	PULAU PERSATUAN	AKTIF
JUMLAH			80	

SINJAI, 28 Desember 2018

KEPALA DINAS,



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

NIP. 19611103 198408 1 001

**JUMLAH POKJA POSYANDU AKTIF SE-KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	AKTIF / TIDAK AKTIF
1	SINJAI UTARA	1 KEL. BALANGNIPA	AKTIF
		2 KEL. BIRINGERE	AKTIF
		3 KEL. LAPPA	AKTIF
		4 KEL. LAMATTI RILAU	AKTIF
		5 KEL. BONGKI	AKTIF
		6 KEL. ALEHANUAE	AKTIF
2	SINJAI BARAT	7 KEL. TASSILILU	AKTIF
		8 KEL. BALAKIA	AKTIF
		9 GUNUNG PERAK	AKTIF
		10 ARABIKA	AKTIF
		11 BONTO SALAMA	AKTIF
		12 TURUNGAN BAJI	AKTIF
		13 BARANIA	AKTIF
		14 BONTO LEMPANGAN	AKTIF
		15 TERASA	AKTIF
3	SINJAI SELATAN	16 KEL. SANGIASERI	AKTIF
		17 PUNCAK	AKTIF
		18 SONGING	AKTIF
		19 ASKA	AKTIF
		20 TALLE	AKTIF
		21 PALAE	AKTIF
		22 BULUKAMASE	AKTIF
		23 PALANGKA	AKTIF
		24 POLEWALI	AKTIF
		25 GARECCING	AKTIF
		26 ALENANGKA	AKTIF
4	SINJAI TIMUR	27 KEL. SAMATARING	AKTIF
		28 SANJAI	AKTIF
		29 PATTALASSANG	AKTIF
		30 PANAİKANG	AKTIF
		31 SAUKANG	AKTIF
		32 KAMPALA	AKTIF
		33 LASIAI	AKTIF
		34 BIRORO	AKTIF
		35 KALOLING	AKTIF
		36 PASIMARANNU	AKTIF
		37 TONGKE-TONGKE	AKTIF
		38 SALOHE	AKTIF
		39 BONGKI LENGKESE	AKTIF
5	SINJAI TENGAH	40 KEL. SAMAENRE	AKTIF
		41 KOMPANG	AKTIF
		42 BARU	AKTIF
		43 PATTONGKO	AKTIF
		44 SAOTENGNGA	AKTIF
		45 SAOHIRING	AKTIF
		46 KANRUNG	AKTIF
		47 SAOTANRE	AKTIF
		48 BONTO	AKTIF
		49 MATTUNRENG TELLUE	AKTIF
		50 GANTARANG	AKTIF

6	BULUPODDO	51	LAMATTI RIATTANG	AKTIF
		52	LAMATTI RIAJA	TIDAK AKTIF
		53	BULUTELLUE	AKTIF
		54	DUAMPANUAE	AKTIF
		55	TOMPOBULU	AKTIF
		56	LAMATTI RIAWANG	AKTIF
		57	LAPPACINRANA	AKTIF
7	SINJAI BORONG	58	KEL. PASIR PUTIH	AKTIF
		59	BATU BELERANG	AKTIF
		60	BIJI NANGKA	AKTIF
		61	BARAMBANG	AKTIF
		62	BONTO SINALA	AKTIF
		63	KASSI BULENG	AKTIF
		64	BONTO KATUTE	TIDAK AKTIF
		65	BONTO TENGGA	AKTIF
8	TELLULIMPOE	66	KEL. MANNANTI	AKTIF
		67	SAOTENGAH	AKTIF
		68	KALOBBA	AKTIF
		69	TELLULIMPOE	AKTIF
		70	MASSAILE	AKTIF
		71	LEMBANG LOHE	AKTIF
		72	PATTONGKO	AKTIF
		73	BUA	AKTIF
		74	SUKAMAJU	TIDAK AKTIF
		75	ERA BARU	TIDAK AKTIF
		76	SAMATURUE	AKTIF
9	PULAU SEMBILAN	77	PULAU HARAPAN	AKTIF
		78	PULAU BUHUNG PITUE	TIDAK AKTIF
		79	PULAU PADAELO	AKTIF
		80	PULAU PERSATUAN	AKTIF
JUMLAH				75

SINJAI, 28 Desember 2018



KEPALA DINAS,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
NIP. 19611103 198408 1 001

**DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	PRODUK UNGGULAN DESA (PRIDES)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SINJAI														
1		BULUPODDO	- Tompobulu	Kereso Mandiri		No.5- PRDS/TB/BP2016	19-01-2016	Direktur HARRIS, S.Pd Sekretaris Bendahara MANSUR MUSOLILFA, S.Ag	L P	085,255,435,005	Tompobulu	Penggemukan Sapi	84,000,000		AKTIF
2			- Bulu Telue	Mabbulo Sipeppa			03-02-2016	Direktur A. HASANUDDIN Sekretaris Bendahara MISRAH RISMA	L P	081,355,979,848	Bulu Telue	Pengelolaan Air Bersih, Simpan Pinjam, Pasar Desa	130,000,000		AKTIF
3			- Duampanuae	Duampanuae		No. 9 Tahun 2016	04-01-2016	Direktur ARMAL, SE Sekretaris Bendahara SYAMSUDDIN ATISA	L P	082,344,443,279	Duampanuae	Perdagangan	46,200,000		
4			- Lappa Cinnara	Lappa Cinnara			08-01-2016	Direktur SALMAN, S. Pd Sekretaris Bendahara SUTARNI NURHABA, S.Ip	L P	081,354,735,205	Lappa Cinnara				AKTIF
5			- Lamatti Riatang	Lamatti Riatang				Direktur MUHL. JAMIL Sekretaris Bendahara ARTYANI, S. Pd	L P			Barang Campuran	79,000,000		
6			- Lamatti Raja	Andi Makkuraga		No. 24 Tahun 2017	24-08-2017	Direktur Indra Ardillah, SE Sekretaris Bendahara Naula Agustina Mustafasyira	L P		Lamatti Raja	Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih			AKTIF
7		SINJAI BARAT	- Gunung Perak	Gunung Perak			13-04-2016	Direktur Sekretaris Bendahara HADAWIAH, S.Pd.I KARTIANA, S.Sos ROSDIANA, S.Pd	P P		Gunung Perak	Rias Pengantin	25,000,000		AKTIF
8			- Turungan Baji	Turungan Baji		No.4 Tahun 2015	08-12-2015	Direktur AHMAD Sekretaris Bendahara MUH. SALEH HASAN BASRI	L L	081,241,487,234	Turungan Baji	Penggemukan Sapi, Pemeliharaan Ikan Air Tawar	26,625,398		AKTIF
9			- Arabika	Arabika Wawokaraeng			15-12-2015	Direktur A. FICHRING Sekretaris Bendahara MUH. IDRIS BA NAWIR, S. Pd	L L		Arabika	Perdagangan Hasil Bumi	25,000,000		AKTIF
10			- Botolempangan	Mekar		01/BL/SBR/2016	05-01-2016	Direktur RAHMAWANTI, S.Si Sekretaris Bendahara ASMAR SALMIATI, SE	P L	085,342,050,616	Botolempangan	sewa alat (Molen)	15,000,000		AKTIF

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	PRODUK UNGGULAN DESA (PRIDE)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
11			- Bento salama	Cahaya Bonsai		No. 5 Tahun 2016	10-06-2016	Direktur HERMAN	P	082,349,128,078	Bontosalama	Waserda dan Andia Jasa, Pengelolaan Air Bersih, Peternakan, dan Penggemukan	55,500,000		AKTIF
12			- Barania	Riminossayya			10-02-2016	Direktur DAHRING, A.Md	L	081,355,000,640	Barania	Jual Beli Hasil Bumi	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris NASRUNG, SP Bendahara SUMARNI MARSUDI	L P						
13			- Terasa	Takkini		No. 4 Tahun 2015	02-12-2015	Direktur ARMAN, A. Ma	L	085,384,055,644	Terasa	Perdagangan Madu	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris FIRMAN, S. Pd Bendahara	L P						
14	SINJAI TIMUR		- Pasmarannu	Karya Mandiri		No. 1 Tahun 2015	23-12-2015	Direktur MUH. YUSUF	L	081,354,379,299	Pasmarannu	Penyewaan Kursi, Alat Musik dan Sound System	35,146,153		AKTIF
								Sekretaris RESKI AULIA Bendahara SUCI HARTINA	P P						
15			- Kampala					Direktur MUZAKKIR	L		Kampala				AKTIF
								Sekretaris JUMA'IN, SE Bendahara RESKI, S. Pd	L L						
16			- Lasia	Pada'idi			30-12-2015	Direktur MUHTAR, A. Ma Pust	L	082,342,309,633	Lasia	Simpan Pinjam, Jasa Sewa	20,908,000		AKTIF
								Sekretaris H. KAHARUDDIN Bendahara NASRAH A. Mk	L P						
17			- Bongki Lengkese	Bilopa Sejahtera			23-12-2015	Direktur A. MUHARRAM	L		Bongki Lengkese	Simpan pinjam, Jasa Sewa Molen	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris AMRINA, S.Sos Bendahara	P						
18			- Sanjai	Bipaksana			23-12-2015	Direktur SAKTIWAN	L	082,188,842,627	Sanjai	Simpan Pinjam	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris MUH. RUSLI Bendahara HASMA	L P						
19			- Patalassang	Patalassang			17-12-2015	Direktur ABBAS	L	081,343,528,138	Patalassang	Simpan Pinjam	75,000,000		AKTIF
								Sekretaris HINDRA HUSBIANTO Bendahara ZUMRIANI	L P						
20			- Tongke Tongke	Sipatoklong			15-12-2015	Direktur MUH. YAHYA	L	085,241,722,712	Tongke-Tongke	Simpan Pinjam, penyewaan kursi	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris MUHAMMAD YAHYA Bendahara HASNI	L P						
21			- Salohe	Malilu Sipakzinge			14-12-2015	Direktur ABD. AZIS M	L	085,341,131,752	Salohe	Simpan Pinjam, Perdagangan	50,000,000		AKTIF
								Sekretaris HASNIATI Bendahara HAERUL AMRI	P L						
22			- Biroro	Arung Burne			25-01-2016	Direktur BAHARUDDIN	L	081,342,154,075	Biroro	Jasa Sewa Makeng	25,000,000		AKTIF
								Sekretaris MUHUS, S.Ag Bendahara Dra. MARWA	L P						
23			- Panaikang	Barugae		No.13/PN/STM/XII /2015	20-12-2015	Direktur ASBULLAH, S. Pd	L		Panaikang	Penyewaan Tenda	20,000,000		AKTIF
								Sekretaris SAHABUDDIN Bendahara ROSDIANA	L P						

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	PRODUK UNGGLAN DESA (PRUDE)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMDESA	JENIS JENIS USAHA BUMDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
24			- Kaloling	Pala-Pala		No.11 Tahun 2015	30-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L L L	085,276,654,483	Kaloling	Simpan Pinjam	45,000,000		AKTIF
25			- Saukang	Saukang				Direktur Sekretaris Bendahara	L L L	085,299,200,798	Saukang	Simpan Pinjam	100,000,000		AKTIF
26		PULAU SEMBILAN	- Pulau Persatuan	Batu Payung			18-09-2016	Direktur Sekretaris Bendahara	P L P	085,311,648,673	Pulau Persatuan	Simpan Pinjam, Pengelolaan Genset Listrik Desa	25,000,000		AKTIF
27			- Pulau Buhung Pitue	Sipatokkong		No. 1 Tahun 2016	15-09-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	P L P		Pulau Buhung Pitue	Simpan Pinjam, Penyewaan Pakaian Pengantin dan Baruga	44,700,000		AKTIF
28			- Pulau Harapan	Gerbang Harapan		No.1/DPH/KPS/201 6	15-02-2016	Direktur Sekretaris Bendahara	L L P	085,311,648,673	Pulau Harapan	Jasa Pemaseran, Penyediaan Barang Kebutuhan	25,000,000		AKTIF
29			- Pulau Padaelo	Pulau Padaelo Sejahtera			25-01-2016	Direktur Sekretaris Bendahara	L P P		Pulau Padaelo	Perdagangan Hasi Laut	25,000,000		AKTIF
30		TELUJUMPOE	- Kalobba	Sejahtera Kalobba		No. 6 Tahun 2015	01-11-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L L P		Kalobba	Simpan Pinjam	55,041,022		AKTIF
31			- Saotengah	Saotengah		No. 4 Tahun 2015	15-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L P L		Saotengah	Sewa Molen/Pengad aan Jasa	42,500,000		AKTIF
32			- Massale	Harapan Jaya		No. 4 Tahun 2015	27-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	P L P		Massale	Simpan Pinjam	85,000,000		AKTIF
33			- Sukamaju	Beringin Jaya		No. 9 Tahun 2015	26-11-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L L P		Sukamaju	Simpan Pinjam, Sewa Molen	26,909,916		AKTIF
34			- Era Baru	Buatanae		No. 6 Tahun 2015	26-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L L L		Era Baru	Sewa Molen	25,000,000		AKTIF
35			- Lembang Lohe	Amanah		No. 2 Tahun 2015	16-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	L L P		Lembang Lohe	Simpan Pinjam	25,000,000		AKTIF

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMIDESA	PRODUK UNGgulan DESA (PRUDE)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMIDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMIDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
36			- Tellulimpoe	Mandiri		No. 6 Tahun 2015	30-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	ASRIN FIRMAN RAIS	L L L	Tellulimpoe	Simpan Pinjam	50,000,000		AKTIF
37			- Samaturue	Samaturue		No. 4 Tahun 2014	18-05-2014	Direktur Sekretaris Bendahara	USMAN IRMAWATI MEGAWATI	L P P	Samaturue	Simpan Pinjam	26,148,686		AKTIF
38			- Bua	Mega Buana		No. 3 Tahun 2015	17-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	MUH. ARIIN ROSMIATI IRWAN SYAM	L P L	Bua	Simpan Pinjam	50,000,000		AKTIF
39		SIBUAI SELATAN	- Aska	Maju Bersama		No. 5 Tahun 2015	03-02-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	MAKMUR ABD. WARIS, S.Pd SULAEHA, S.Pd	L L P	Aska	Rias Pengantin, Sewa Alat Molen	189,114,539		AKTIF
40			- Songing	Padaidi Sipakabuo			11-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	RAMLI A HISBULLAH SYARIFUDDIN	L L L	Songing	Penggemukan Sapi	50,000,000		AKTIF
41			- Puncak	Samaturue		No. 5 Tahun 2015	06-05-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	KAMAL, SE AMBO TANG SYARIFUDDIN	L L L	Puncak	Simpan Pinjam, Pulse listrik, Pengadaan Pupuk	78,000,000		AKTIF
42			- Garecing	Sipakainge		No. 5 Tahun 2015	15-02-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	LUKMAN ZULRIKAR ABU BAKAR	L L L	Garecing	Usaha Air Galon, Simpan Pinjam	70,000,000		AKTIF
43			- Palangka	Tonti Daeng Manggangka		No. 2 Tahun 2015	24-12-2015	Direktur Sekretaris Bendahara	H. HAMBALUNG RAMSAH, BSW ARHAM, SP	L L L	Palangka	Sewa Molen, Air Bersih dan Simpan Pinjam	35,000,000		AKTIF
44			- Talle	Mabbulo Sipeppa		No. 5 Tahun 2016	23-05-2016	Direktur Sekretaris Bendahara	ARMAN, SE MARCIANA A. SYAM ASMITA SYAHRUL	L P P	Talle	Warung kopi Penjualan, Perkebunan dan Kehutanan	38,000,000		AKTIF
45			- Polewali	Polewali Maju		No. 5 Tahun 2016		Direktur Sekretaris Bendahara	MURIL YUSUF AHMAD SULTAN	L L L	Polewali	Pengelolaan Pasar Desa, Perdagangan umum, Kerajinan Rakyat dan industri RT, Pengelolaan Air Bersih	50,000,000		AKTIF

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	PRODUK UNGGULAN DESA (PRIDES)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
46			- Bulu Kamase	Siamasei			28-12-2015	Direktur MUH. SABIR Sekretaris Bendahara SAHABUDDIN NABILA	L L P		Bulu Kamase	Usaha Jasa, Industri kecil dan RT, Budidaya dan perdagangan Hasil Pertanian	50,000,000		AKTIF
47			- Alenangka	Sipakatau		No. 5 Tahun 2015	30-06-2016	Direktur SUARDI, SE Sekretaris Bendahara IRWAN SUHAENI	L L P		Alenangka	Simpan Pinjam, Sewa Alat Pengantin	50,000,000		AKTIF
48			- Palae	Paridai		No. 6 Tahun 2016	08-02-2017	Direktur MUH. SYUKRI Sekretaris Bendahara NASRULLAH HARSAYANI	L L P	085298248811	Palae				AKTIF
49		SINJAI BORONG	- Barambang	Barambang Kutute		No. 1 Tahun 2016	19-01-2016	Direktur AMIRUDDIN, S.Pd Sekretaris Bendahara HAERUDDIN DARMIATI, SE	L L P	085,299,248,470	Barambang	Saprodi Pertanian	25,000,000		AKTIF
50			- Biji Nangka	Usaha Baru		No. 1 Tahun 2016	04-01-2016	Direktur IRAWATI, S.Pd Sekretaris Bendahara MUHAMMAD ANIS ANITA PUSPA UTAMI	P L P		Biji Nangka	Simpan Pinjam, Peternakan	72,281,000		AKTIF
51			- Batu Belerang	Karya Indah		No. 5 Tahun 2015	11-12-2015	Direktur H. M. ALIMIN Sekretaris Bendahara AHMAD MUH. PAMLI	L L L	082,337,054,514	Batu Belerang	Simpan Pinjam	37,880,200	4,380,200	AKTIF
52			- Bonto Sinala	Sipatuo		No. 3 Tahun 2014	16-03-2016	Direktur SEKRETARIS BENDAHARA MAKMUR TASWIN SAKARIAH	L L L	085,247,401,788	Bonto Sinala	Peternakan	20,000,000		AKTIF
53			- Bonto Kutute	Batu Palla		No. 4 Tahun 2016	15-02-2016	Direktur AIGMAL Sekretaris Bendahara AMBO DALLE FAHMIWATI	L L P	085,299,248,470	Batu Palla	Simpan Pinjam, Pengelolaan Air Bersih	24,850,337		AKTIF
54			- Kassibuleng	Bakti Karya Mandiri		No. 4 Tahun 2016	01-01-2016	Direktur MUHTAR MUCHSIN Sekretaris Bendahara BAKRI SAHRIAH, S.Pd	L L P	085,255,962,553	Kassibuleng	Simpan Pinjam	61,000,000		AKTIF
55			- Bontotengnga	Karya Mandiri		No. 7 Tahun 2015	30-12-2015	Direktur ZAINA, S.Pd Sekretaris Bendahara JUSMAWATI, S.Pd RAHMATIAH, S.Pd	L P P	082,291,504,783	Bontotengnga	Peternakan, Rias pengantin, Kerajinan, Simpan Pinjam			AKTIF
56		SINJAI TENGAH	- Sototengnga	Makaebata			29-09-2015	Direktur A. KURNIAWAN, SE	L	081,355,400,769	Sototengnga	Simpan Pinjam, Tenda Pengantin, Pengelolaan Air Bersih, Jual-Jual	100,000,000		AKTIF

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	PRODUK UNGGULAN DESA (PRUDES)	DASAR HUKUM (PERDESA)	TAHUN PENDIRIAN	NAMA PENGELOLA	L/P	ALAMAT EMAIL DAN HP CONTACT PERSON	ALAMAT KANTOR BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	OMSET (LABA KOTOR) PER- TAHUN	KEUNTUNGAN BERSIH PER- TAHUN	KETERANGAN
								Sekretaris Bendahara	L L			Alat Pertanian			
57			- Mattunreng Telue	Mattunreng Telue			14-06-2016	Direktur FITRIADI MARSUDI, S.Pd.I Sekretaris Bendahara SIRAJUDDIN LISMAWATI, S.Pd.I	L L P	08114110357	Mattunrengtelue	Simpan Pinjam			AKTIF
58			- Baru	Bina Usaha			27-09-2016	Direktur Sekretaris Bendahara RIDWAN AMBO, S.Pd	L L	085397882250	Baru	Saprodi			AKTIF
59			- Saohiring	Mattirodeong			02-11-2015	Direktur TAJUDDIN, S.Pd Sekretaris Bendahara SUTRISNO NURAENI	L L P	085,256,761,050	Saohiring	Pengelolaan Air Bersih, Pasar Desa, Simpan Pinjam	101,000,000		AKTIF
60			- Kumpang	Pakontongang				Direktur Sekretaris Bendahara ASWIWIN RESKI AMALIA Hj. SAIDAH	L P P	085 319 219 827	Kumpang	Sewa Elekton	40,000,000		AKTIF
61			- Sootanre	Masyoa Hanu			15-06-2016	Direktur A. MAKMUR Sekretaris Bendahara SAENAL ABIDIN, S.Kom.I A. MAGFIRAH WAHYU	L L P	082 395 456 723		Pelayanan Jasa	50,000,000		AKTIF
62			- Kanung	Sumber Surya			28-01-2016	Direktur Sekretaris Bendahara A. AKMAL YAHYA, SE IRMAWATI, S.Pd BAHAR	L P L						AKTIF
63			- Gantarang	Abkulo Sipappa			11-01-2017	Direktur FIRMAN Sekretaris Bendahara NURMALITASARI, A.Md.Farm SULMIATI, S.Pd.I	L P P	082 190 464 643		Pertanian dan Peternakan, Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Wisata	80,000,000		AKTIF
64			- Bonto	Maju Bersama			16-11-2016	Direktur Sekretaris Bendahara SUSISUSANTI AHMADINING RAMLI	L L L	082199103887	Bonto	Simpan Pinjam			AKTIF
65			- Pattongko	Pattongko			1-11-2017	Direktur Sekretaris Bendahara MUH. IDRIS TALIRE SUPRIYADI HIRIYANI	L L P		Pattongko				AKTIF
Jumlah									Laki-Laki : 128 Perempuan : 65			2,619,845,191	4,880,200		

Mengetahui
Kepala Dinas Pembudayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Sintang

A. ZAINAL ARIFIN NUR SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196312103 198408 1 001



**DATA KELOMPOK UED-SP BINAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

No	Kecamatan/Desa/Kel	Nama Kelompok	Nama Ketua	L/P	Jumlah Anggota	Ket.
1.	Kecamatan Sinjai Tengah 1. Bonto	UED-SP Riski Amalia	- Nurhayati (Ketua) - Jannawirita (Sekertaris) - Intan (Bendahara)	P P P	35 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Kanrung	UED-SP Tasiwata	- Buhari Hamid (Ketua) - Firdaus (Sekertaris) - Syamsul Bahri (Bedahara)	L L L	25 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
2.	Kecamatan Sinjai Barat 1. Tassillilu	UED-SP Tassililu	- Hasnah (Ketua) - Marwah Asnawi (Bendahara)	P P	12 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
		UED-SP Lestari	- Nurcaya (Ketua) - Nurzakiayah (Bendahara)	P P	3 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Terasa	UED-SP Terasa	- Saming (Ketua) - A .Baso (Sekertaris) - A .Tendriwati (Bendahara)	L L P	20 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
3.	Kecamatan Tellulimpoe 1. Bua	UED-SP Bahagia	- Lanco (Ketua) - Mustafa (Sekertaris) - Maemunah (Bendahara)	L L P	20 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)

4.	Kecamatan Sinjai Borong 1. Bonto Sinala	UED-SP Sipatuo	<ul style="list-style-type: none"> - ABD. Rajab (Ketua) - Mappanyukki (Sekertaris) - Nurhayati (Bendahara) 	L L P	150 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
5.	Kecamatan Sinjai Utara 1. Bongki	UED-SP Cenning Atie	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Ashari, S.sos (Ketua). - Megawati (Sekertaris) - Warda (Bendahara) 	L P P	29 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Alewanuae	UED-SP Assamaturuseng	<ul style="list-style-type: none"> - Saifuddin,A.Md (Ketua) - Rosmina (Sekertaris) - Sinarwati (Bendahara) 	L P P	13 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	3. Biringere	UED-SP Topekkong	<ul style="list-style-type: none"> - Muh.Natsir,S.Ag (Ketua) - Fattah (Sekertaris) - Arni (Bendahara) 	L L P	5 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	4. Lappa	UED-SP Bahari Topekkong	<ul style="list-style-type: none"> - S u a r d i. P (Ketua) - M. Rafi (Sekertaris) - Hastuti Irmayanti (Bendahara) 	L L P	19 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	5. Lamatti Rilau	UED-SP Lamatti	<ul style="list-style-type: none"> - Awaluddin S.IP (Ketua) - Hariani Alwi, SE - Sukamawati, SE 	L P P	4 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)

6. Balangnipa	UED-SP Benteng Balangnipa	<ul style="list-style-type: none"> - Agussalim (Ketua) - Hikmah (Sekertaris) - Sumarni (Bendahara) 	L P P	15 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
Jumlah			L = 17 Orang P = 20 Orang	335 Orang	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai,



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

**DATA KELOMPOK BINAAN PNPM-MP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA PENGURUS UPK PNPM-MP	L/P	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	Sinjai Tengah	Ketua : Sainal Bendahara : Rizki, S.E	L L	30	890	Aktif
2	Sinjai Barat	Ketua : Sukmawati, SE Bendahara : Jamila, SE	P P	25	1.200	Aktif
3	Bulupoddo	Ketua : Azikin, S.Pdi Bendahara : Syamsiah Mungkar, S.Ag	L P	40	620	Aktif
4	Pulau Sembilan	Ketua : Rusman, S.S.T.Ars Bendahara : Wahyu	L L	18	450	Aktif
5	Sinjai Selatan	Ketua : Slamet Riyadi Bendahara : Aprianto	L L	23	390	Aktif
6	Tellulimpoe	Ketua : Muzakkir, SE Bendahara : Sitti Aisyah	L P	36	490	Aktif
7	Sinjai Timur	Ketua : M. Darwis T Bendahara : Abdul Hamid, S.Pd. SD	L L	15	410	Aktif

8	Sinjai Borong	Ketua : Nurul Ilimi Jaya, S.Pd Bendahara : Asrina, SE	P P	29	420	Aktif
Jumlah			L = 10 Orang P = 6 Orang	216	4.870	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai,



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Mading No. 5 Sinjai Kode Pos 92612 Sulawesi Selatan Tlp. (0482) 21086

CAKUPAN MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA

NO	KECAMATAN	JUMLAH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN GOTONG ROYONG	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
1	BULUPODDO	9,639	17,551	55
2	PULAU SEMBILAN	4,198	7,568	55
3	SINJAI SELATAN	29,533	40,967	72
4	SINJAI BARAT	18,621	24,717	75
5	SINJAI BORONG	12,115	17,561	69
6	SINJAI TENGAH	14,592	28,189	52
7	SINJAI TIMUR	15,254	33,549	45
8	SINJAI UTARA	55,738	255,853	22
9	TELLULIMPOE	16,253	36,853	44
JUMLAH		175,943	462,808	38

Mengetahui

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Sinjai



A. ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 198408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Mading No. 5 Sinjai Kode Pos 92612 Sulawesi Selatan Tlp. (0482) 21086

**PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK
PKK**

NO	PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK	PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK (%)
1	Penyuluhan PHBS	100
2	Lomba Penyuluhan Kader Posyandu	100
3	Bimbingan Teknis Kader BKB terintegrasi PAUD dan POSYANDU	100
4	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	100
5	Pembinaan dan Pengembangan UP2K	100
6	Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	100
7	Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga	100
8	Lomba Kelompok Kadarkum	100
9	Workshop Tata Cara Berbusana yang Baik	100
JUMLAH		100



Mengetahui

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Sinjai

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 198408 1 001

**DATA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIKEMBANGKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KELOMPOK	TAHUN TERBENTUK	ALAMAT DESA/KECAMATAN	JENIS ALAT	JUMLAH	KET.
1.	Kelompok Tani Al Iman	2010	Palae / Sinjai Selatan	Alat Pemanen Padi	1 Unit	
2.	Kelompok Wanita Tani	2011	Desa Saotengah / Tellulimpoe	Pembuatan Permen Manisan Buah	1 Paket	
3.	Kelompok Tani Data I	2013	Desa Tompobulu / Bulupoddo	Alat Pengering Kakao	1 Unit	
4.	Kelompok Usaha Bersama Sukamaju	2013	Arabika / Sinjai Barat	Mesin Spiner (Alat pengering knpik)	1 Unit	
5.	Kelompok Wirausaha Sapo Tinggi Art and Craft	2014	Biringere / Sinjai Utara	- Alat mesin Lasting - Tabung gas argon	1 Unit	
6.	Kelompok Tani KPK Sipakainge	2014	Desa Pasimarannu / Sinjai Timur	Pengelolaan Minyak Goreng Ber-VCO	1 Paket	
7.	Desa Terasa	2015	Desa Terasa / Sinjai Barat	Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTHM)	1 Paket	
8.	KUB Samaturue	2015	Bontosalama / Sinjai Barat	Alat Pemasak/Gula Aren/Wajan	2 Buah	
9.	Wartek Mawar	2015	Duampanuae / Bulupoddo	Alat Pemipil Jagung	1 Unit	

10.	Wartek Balla Pale	2017	Batu Belerang / Sinjai Borong	Alat Pengering Kakao	1 Unit	
11	Desa Palangka	2017	Desa Palangka / Sinjai Selatan	Alat Pembuatan Gula Semut Aren	1 Unit	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai,



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001